

Perempuan Papua dan Pemerintahan Desaⁱ

I. Pengantar

Pembangunan Indonesia bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan aktif dalam berbagai kegiatan kedamaian internasional, sebagaimana termaktub dalam mukadimah konstitusi negara ini. Pembangunan juga tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun keterlibatan masyarakat sebagai subjek pembangunan juga harus lebih besar. Sebab itu pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berdasarkan prinsip *bottom up*.

Pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab lelaki, namun juga perempuan, terlebih karena kebutuhan masing-masing pihak diketahui paling baik oleh pihak itu sendiri. Apa yang dibutuhkan perempuan diketahui paling baik oleh perempuan itu sendiri, oleh karenanya keterwakilan perempuan dalam berbagai pengambil kebijakan dan lembaga yang mempengaruhi kebijakan adalah mutlak.

Perempuan juga memiliki peran strategis dalam melakukan pembangunan secara nasional, terlebih secara ratio, jumlah perempuan hampir seimbang dari jumlah laki-laki. Sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2010 merilis dari 237.556.363 orang penduduk Indonesia 49% nya atau 118.048.783 orang adalah perempuan. Sebab itulah perempuan juga memegang peranan penting dan potensial dalam pembangunan.

Hanya saja dalam kehidupan sehari-hari, perempuan di Indonesia masih berada dalam subordinat dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran perempuan masih dianggap sebelah mata dan memiliki ruang gerak terbatas dalam mengisi kesehariannya. Perempuan masih dinilai memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugas dan mengisi pembangunan lantaran sifat alami yang dimilikinya. Sebab itulah perempuan masih sedikit mendapatkan peran-peran strategis dalam mengisi pembangunan. Indikatornya dapat dilihat dari tiga hal: **pertama, aspek ekonomi**. Perempuan Indonesia masih banyak yang berada dalam garis kemiskinan. Rendahnya pendapatan dan kurangnya akses dalam perekonomian membuat kaum perempuan Indonesia semakin terpuruk. Saat ini 4,7 juta perempuan di Indonesia masih menganggur. Masih kuatnya budaya patriarki juga menyebabkan ketimpangan sosial. Sehingga, kaum perempuan sulit mengakses pekerjaan, pendidikan dan aktualisasi diri.

Kedua, aspek pendidikan. Dari jumlah perempuan pekerja di Indonesia sekitar 81,15 juta orang dan 56 persen atau 45,4 juta orang di antaranya hanya berpendidikan SD. Hanya 4,7 persen atau 3,8 juta yang berpendidikan akademi atau sarjana, data BPS tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat banyak kasus dimana anak perempuan terpaksa tidak bersekolah untuk mengurangi biaya pendidikan yang ditanggung keluarganya dan terpaksa masuk ke angkatan kerja mencari nafkah bagi keluarganya, dan lebih banyak anak perempuan usia sekolah yang bekerja dibandingkan anak laki-laki. Jumlah buta aksara perempuan masih 2 kali lipat dari laki-laki (perempuan 12,28%, laki-laki 5,48%) dan rata-rata lama bersekolah perempuan (7,1 tahun) lebih rendah daripada laki-laki (8,0 tahun). Jumlah sarjana perempuan masih di bawah 5%.

Ketiga, aspek kesehatan. Derajat kesehatan kaum perempuan juga sangat memprihatinkan. Walaupun Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sudah menurun, namun ternyata masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. AKI di Indonesia terakhir berada di angka 228/100.000 kelahiran hidup setelah sebelumnya sebesar 307/100.000 kelahiran hidup.

Guna memaksimalkan peran perempuan dalam pembangunan, maka pada tahun 2010 Pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, sebagai acuan untuk memaksimalkan potensi perempuan dalam pembangunan. Dalam keluarga, kaum perempuan merupakan tiang keluarga, kaum perempuan akan melahirkan dan mendidik generasi penerus. Kualitas generasi penerus bangsa ditentukan oleh kualitas kaum perempuan sehingga mau tidak mau kaum perempuan harus meningkatkan kualitas pribadi masing-masing.

II. Perempuan Papua Hari Ini

TuK INDONESIA mengadakan diskusi terbatas dengan pemerhati dan pengadvokasi perempuan dan HAM pada November 2014 lalu untuk menggali lebih dalam mengenai perempuan Papua dan apa yang bisa dibawa untuk langkah maju. Nara sumber diskusi, Ibu Maria Ruwiasutiⁱⁱ mengemukakan bahwa persoalan perempuan yang begitu mendasar, mendarah daging dan senyatanya terletak pada *bagaimana dan oleh siapa peran gender dan posisi sosial mereka ditetapkan*. Pertanyaan kritisnya adalah: benarkah para perempuan itu sendiri telah memilih peran gender dan posisi sosialnya yang subordinatif dan domestik? Sampai hari ini kita masih sering mendengar para orang tua menasihati anak-anak perempuan mereka begini: *“Tidak ada guna kamu bersekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya suamimu kelak akan menyuruhmu kembali bekerja di dapur dan menjaga anak-anakmu di dalam rumah, bukan di kantor”*.

Memang perempuan tidak memilih sendiri apa peran gender mereka. Mereka juga tidak bebas menentukan posisi sosialnya. Semua itu sudah ditentukan oleh para lelaki sejak delapan ribu tahun lalu bahkan dengan cara paksa, sedemikian rupa sehingga pada akhirnya para perempuan itupun meyakini “pilihan” itu sebagai “hal baik” (bahkan bisa menjadi “hal kudus”), yang perlu diajarkan kepada anak-anak perempuan mereka kelak, begitu seterusnya. Setelah keyakinan ini mengakar dalam masyarakat maka untuk membantahnya diperlukan suatu keberanian luar biasa. Satu dua orang pemberani semacam itu (bisa lelaki, bisa perempuan) memang pernah muncul di masyarakat dan mereka umumnya tampil sebagai pelopor perubahan sosial

Problem mendasar ini di tingkat komunitas diawali dengan posisi dan tugas tradisional perempuan Papua di dalam rumah keluarga besarnya. Problem ini kelihatannya seakan-akan dapat diatasi dengan terbukanya kesempatan mereka untuk bekerja di luar rumah. Bisa jadi tugas-tugas di luar rumah itu akan membantu mengatasi problem perempuan. Tapi bisakah menghilangkan sama sekali? Tidak ada yang bisa menjamin, sebab pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan kepada perempuan pada awalnya tidak terlalu jauh beranjak dari tugas-tugas domestik yang lazim mereka lakukan dalam komunitas

tradisionalnya, seperti merawat orang sakit, memasak, mendidik balita (guru Taman Kanak-kanak), mengurus rumah (house keeper). Apalagi kalau perempuan Papua mulai memasuki “dunia baru” mereka yaitu hidup perkawinan. Di “dunia baru” ini tidak jarang justru mereka akan berhadapan dengan sejumlah persoalan lain yang mungkin tidak mereka duga sebelumnya, seperti misalnya: tindak kekerasan sang suami terkait (baik langsung maupun tidak) dengan beban kewajiban membayar harta kawin kepada orang tua sang istri.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab masalah bukan semata-mata kurangnya kesempatan bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah, melainkan nilai-nilai subordinat yang sudah tertanam dalam benak mereka sejak kanak-kanak.

Hal yang terjadi di Papua masih dalam seputar posisi dan tugas tradisional perempuan yang mengurus pekerjaan domestik di dalam rumah besarnya, dengan harapan saat keluar rumah perempuan bisa mengatasi itu dengan bekerja di luar rumah. Akan tetapi ketika perempuan bekerja di luar rumah, pekerjaan yang ditawarkan adalah pekerjaan yang tidak beranjak dari tugas-tugas mereka mengurus soal domestik di keluarga besar seperti mengurus anak, memasak, merawat orang sakit.

Persoalan semakin kompleks apalagi ketika perempuan itu sudah memasuki dunia baru seperti pernikahan, mereka tidak jarang akan menghadapi persoalan lain seperti tindak kekerasan dalam rumah tangga karena hak kawin adalah milik orang tua perempuan bukan perempuan itu sendiri. Jika melihat sisi tersebut (perempuan bekerja diluar rumah tapi masih tetap mengerjakan domestik) penyebab masalah bukan hanya kurangnya kesempatan perempuan bekerja di luar rumah namun nilai-nilai subordinasi (halangan budaya) yang sudah ditanamkan sejak kecil itu juga merupakan masalah utama yang dihadapi oleh perempuan Papua khususnya Merauke, seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1: Potensi Alamiah Perempuan vs Halangan Budaya

Potensi Alamiah Perempuan	Halangan Budaya
Kuat Bekerja	Kekuatan perempuan lebih banyak digunakan untuk kerja-kerja domestik (rumah tangga)
Berani	Keberanian perempuan kurang dihargai bahkan sering dijadikan bahan olok-olok lelaki (mental perempuan sengaja dijatuhkan)
Cakap berbicara	Lelaki lebih didengar dan diperhitungkan pendapatnya karena dianggap lebih penting.
Gemar Belajar	Lelaki lebih didahulukan untuk belajar Contohnya : Satu keluarga menjual anaknya perempuan (mengawinkan) kepada laki-laki yang menyerahkan 2 kepada orang tua perempuan tersebut dan 2 ekor babi tersebut dijual dan hasil penjualan babi tersebut digunakan untuk membayar SPP anak laki-laki

	(mengorbankan anak perempuan untuk anak laki-laki)
Mampu bertanggungjawab	Perempuan hanya diberi tanggung jawab terbatas pada urusan-urusan privat/domestik sedangkan urusan publik lebih dipercayakan kepada lelaki.
Mampu merebut kesempatan	Perempuan tidak dibiarkan bersaing dengan lelaki. Perempuan lebih dibiarkan bersaing antar sesama perempuan.

Design strategi membangun peran perempuan dalam pemerintahan desa

Dalam perjalanannya potensi alamiah perempuan juga akan menghadapi halangan budaya, padahal perempuan itu kuat tapi kekuatan perempuan itu lebih banyak digunakan untuk kerja-kerja domestik, perempuan itu berani tapi keberaniannya kurang dihargai bahkan kadang sering dijadikan olok-olok oleh kaum laki-laki dengan kata lain mental perempuan itu sengaja dijatuhkan, perempuan itu cakap berbicara tapi lelaki didengar, perempuan itu gemar belajar tapi kaum laki-laki yang didahulukan untuk belajar, perempuan itu mampu bertanggung jawab tapi tanggung jawab tersebut hanya diberikan untuk urusan-urusan domestik.

Halangan budaya ini harus dilawan sehingga para perempuan mampu menjadi pemimpin sehingga diperlukan design strategi membangun peran perempuan pemerintahan desa, dengan melakukan tahap-tahapan sebagai berikut :

Tahap awal: pilihlah perempuan-perempuan yang sudah ketahuan ketangguhan dan minatnya dalam memimpin komunitas kecil mereka.

Tahap kedua: siapkan pelatihan-pelatihan multi level yang diawali dengan pembongkaran mindset ter subordinasi itu bagi para perempuan yang sudah terseleksi, guna mempersiapkan mereka menjalankan tugas-tugas publik dalam pemerintahan desa.

Syaratnya: melatih, mendampingi dan mengawal tanpa putus. Siapkan kemudahan dalam bentuk kebijakan khusus yang memungkinkan para perempuan itu bekerja di bidang publik tanpa perlu kehilangan peran-peran dan relasi sosial tradisional mereka dengan sesama perempuan dalam komunitas awalnya. Jangan mencabut para perempuan itu dan menjadikan mereka “lelaki” mengingat dunia kerja mereka masih merupakan “dunia lelaki”. Salah satu contoh, siapkan fasilitas pengasuhan bayi dan balita di kantor tempat kerjanya.

Aktor pendukung: dukungan moral yang paling dibutuhkan adalah berasal dari keluarga dekatnya (ibunya, ayahnya, saudaranya, suaminya). Setelah itu dukungan dari para pendamping, tutor, pelatih dan rekan-rekannya sesama perempuan. Ibu Maria menekankan bahwa semasa tumbuh, ayahandanya sangat mendukung pendidikan, aktifitas dan segenap pencapaiannya; selalu didorong, bahkan

dibanggakan, dan tidak mendapat diskriminasi dari saudara lelakinya; sementara di sisi lain, ibunya sangat konservatif dan hanya menginginkan peran perempuan stereotype darinya: menikah dan berkeluarga.

Kebijakan yang dibutuhkan: yaitu semua kebijakan baru yang sengaja diciptakan guna memudahkan perempuan diterima di dunia kerja publik tanpa diskriminasi dan pelecehan dari rekan kerja lelaki mereka.

Rekomendasi khusus: Dalam pelaksanaan kegiatan, perempuan tidak bisa serta merta digabungkan dengan kaum laki-laki; karena keberanian berbicara di depan banyak orang tidak serta merta terbentuk, apalagi karena kendala budaya. Perlu waktu menumbuhkan kepercayaan diri bagi para perempuan sebelum bisa berbicara dan mengeluarkan pendapat di depan publik audiens laki-laki.

III. Partisipasi Perempuan Papua dalam Politik

Nara sumber utama untuk bahasan ini adalah Bapak Edward Kocuⁱⁱⁱ. Tuntutan tentang keterwakilan dalam lembaga pengambil keputusan merupakan perbincangan yang telah lama dalam kancah gerakan perempuan. Pada Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928, gerakan tersebut menuntut agar kaum perempuan disertakan dalam pemilihan anggota dewan perwakilan sebagaimana kaum laki-laki, baik dalam tingkat kotapraja, kabupaten, dan tingkat provinsi. Kemudian dalam kongres pemuda Indonesia kelima, bahasan tentang hak untuk memilih, dipilih, dan duduk diperewakilan mendapatkan porsi khusus. Partisipasi perempuan menjadi penting manakala perempuan tidak secara proposional terlibat dalam pengambilan keputusan. Meski sudah banyak perempuan yang ikut terlibat dalam dunia politik, namun di sisi lain masih banyak hambatan: struktural, fisik, kultural masih membelenggu kaum perempuan.

Di Papua, kendala struktural seringkali berkaitan dengan permasalahan pendidikan, status sosial, ekonomi, dan pekerjaan. Pekerjaan perempuan masih sering diidentik dengan pekerjaan “kelas dua” yang sulit berimbang dengan laki-laki. Sementara kendala kultural terkait dengan faktor budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai seorang ibu rumah tangga yang bertugas mengurus semua pekerjaan dalam rumah tangga. Secara fisik, perempuan ditempatkan sebagai pendamping dalam pemenuhan biologis. Disisi lain, konsekuensi dari pemaksaan fisik menempatkan perempuan sebagai kaum yang lemah.

Masuknya perempuan Papua ke ranah publik, khususnya politik, mulai terlihat pada awal pemilu 2004, langkah awal ini menunjukkan adanya motivasi dan kompetensi yang cukup memadai untuk terjun dalam dunia politik. Dengan munculnya sederet nama politisi perempuan asli Papua seperti Yohana Yembise yang baru saja dilantik dalam kabinet Jokowi-JK; memberikan spirit awal dan atmosfer tersendiri

bagi perempuan di Papua.

Potret perempuan Papua pada umumnya memang masih dinomorduakan. Hal ini tak terelakan dari karakteristik budaya di Papua yang terbagi dalam 7 (tujuh) wilayah adat dengan ± 500 bahasa memiliki perspektif tersendiri terhadap perempuan dimasing-masing wilayah adat. Bila diteropong dari segi adat, pada umumnya nilai kultur dan agama yang diyakini oleh masyarakat Papua, cenderung merugikan posisi perempuan. Adat menempatkan perempuan sebagai objek milik laki-laki sementara agama memandang perempuan sebagai pendamping laki-laki.

Dalam tradisi Papua perempuan dianggap sebagai orang luar, karena setelah menikah ia akan keluar dari lingkungannya, dan juga perempuan adalah orang luar (outcasted) dari segala bentuk pengambilan keputusan adat. Perempuan ditempatkan bukan sebagai individu tunggal melainkan hanya sebagai perpanjangan tangan dari kepentingan dan kebutuhan laki-laki. Selain itu, peran perempuan Papua oleh nilai adat di masing-masing wilayah adat memang banyak ditempatkan hanya di sekitar sumur, kasur dan dapur. Perempuan diposisikan sebagai individu yang memenuhi kebutuhan konsumsi dan seks dalam keluarga.

Adat: Perempuan Papua Begitu Berarti

Papua sangat kaya akan etnis, lebih dari 300 suku dan 500 bahasa mendiami pulau cenderawasih. Bahkan konon dikabari oleh bahwa masih ada sebagian suku dan bahasa yang belum tersentuh oleh peradaban. Kemajemukan ini menjadikan Papua sebagai surga bagi para antropolog dunia. Searah dengan kemajemukan etnik di Papua maka untuk keperluan penulisan materi ini maka pemetaan Papua dibagi kedalam 3 (tiga) bagian. *Pertama*, Papua bagian Barat dengan wilayah adat Maybrat sebagai Sampel. *Kedua*, Papua bagian tengah dengan wilayah Adat Dani sebagai sampel. *Ketiga*, Papua bagian Timur dengan wilayah Adat Asmat sebagai sampel. Berikut adalah tabel yang menggambarkan peran perempuan Papua menurut 3 (tiga) wilayah adat tersebut.

Tabel 2: Peran Perempuan Berdasar Wilayah Adatnya

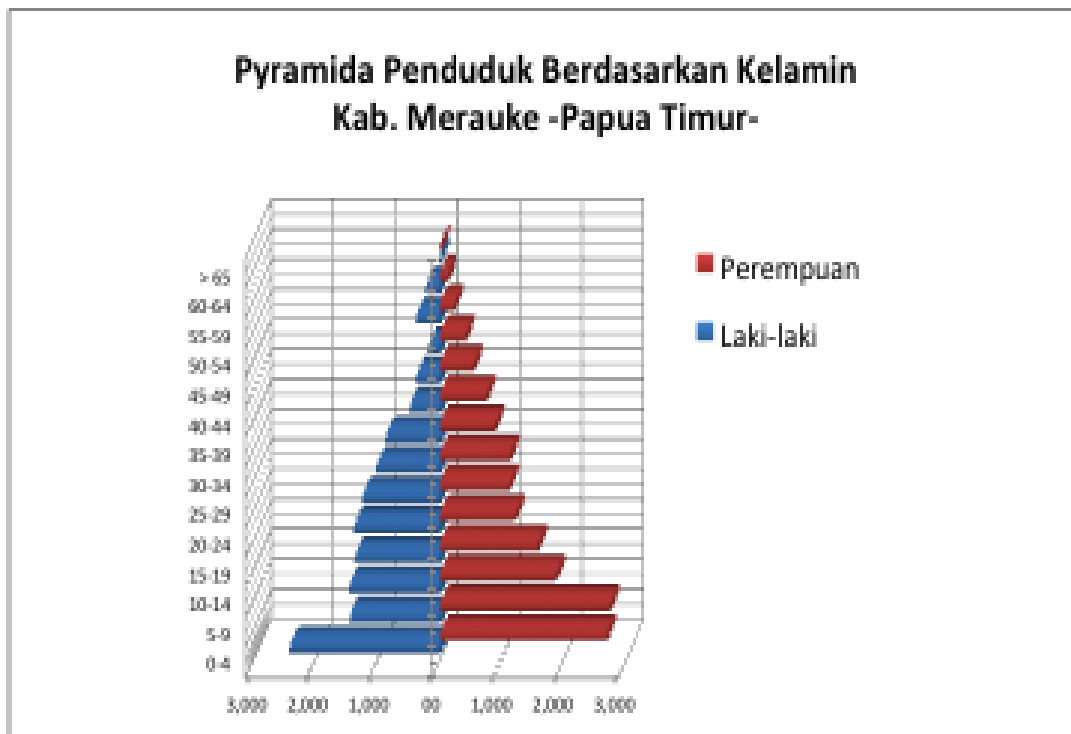
No	Suku	Peran
1	Maybrat (Papua Barat)	<ul style="list-style-type: none">• Perempuan sebagai <i>investasi</i> seseorang laki-laki untuk menjadi Bobot/bangsawan. Bagi orang Maybrat, lebih baik punya anak perempuan dari pada anak laki-laki.• Perempuan membuka jalur politik tradisional (kaintimor)
2	Dani (Papua Tengah)	Perempuan sebagai tumpuan kehidupan ekonomi keluarga perempuan sebagai symbol kejayaan seorang laki-laki (kepala suku)
3	Asmat (Papua Timur)	Perempuan sebagai kepala dalam keluarga (menafkahi) karena ia lebih berperan dari pada suami.

Seks: Perempuan Lebih Unggul Dibanding laki-Laki

Bila diteropong dari segi jumlah maka sebenarnya perempuan lebih dominan daripada laki-laki. Situasi ini akan menjadi sangat menarik bila dikaitkan dengan politik. Artinya sebenarnya perempuan di Papua memiliki posisi tawar dalam politik. Bila dicermati, secara keseluruhan, elit perempuan telah ada di kabupaten, kota, dan Provinsi. Peluang perempuan lebih terbuka pada level tersebut dibandingkan pada level distrik dan kampung. Informasi, pendidikan, dan lembaga/komunitas perempuan lebih banyak di kabupaten/kota daripada distrik dan kampung.

Persoalan dan kebutuhan yang mendera perempuan Papua tentu perlu diselesaikan dan menjadi tanggung jawab bersama antar berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga legislatif sebagai pembuat kebijakan. Anggota legislatif perempuan yang seharusnya mengemban tugas ini karena dinilai mampu, mengerti dan merasakan persoalan serta kebutuhan yang selama ini dimiliki oleh perempuan Papua. Mereka memiliki fungsi reproduksi yang sama, rentan menjadi korban kekerasan, dan juga merasakan sulitnya situasi akibat kerusakan lingkungan dan lemahnya pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, terdapat harapan besar bahwa anggota dewan perempuan akan mendorong kebijakan-kebijakan responsif, khususnya yang terkait persoalan dan kebutuhan perempuan. Perjuangan tersebut memerlukan upaya yang sistematis, terprogram, dan berkelanjutan. Bentuk perjuangan perempuan yang nyata saat ini adalah dalam bidang politik.

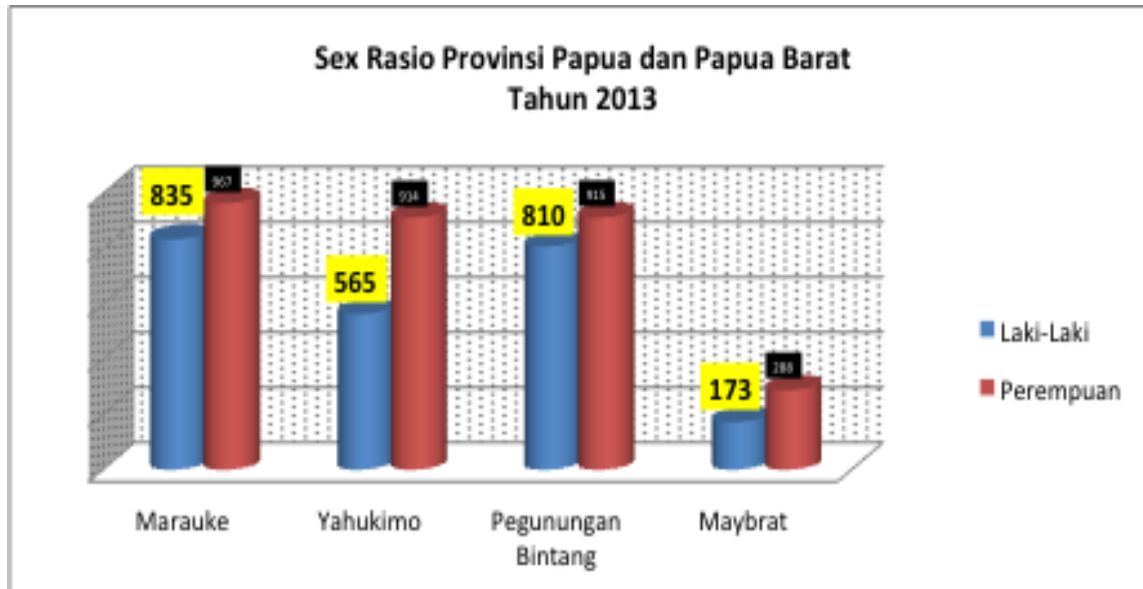
Tabel 3:Pyramida Penduduk Berdasarkan Kelamin di Kabupaten Merauke, Papua Timur



Kurangnya partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif, disebabkan oleh hambatan yang

menghalangi kemajuan mereka, yaitu budaya patriarki, subordinasi gender, lingkungan sosial budaya, dan pendidikan. Padahal kalau dilihat berdasarkan data sex ratio dan data pyramida penduduk, perempuan di Papua sangat diuntungkan dalam politik. Oleh karena itu, berbagai strategi perlu dipelajari secara baik untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga tujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif bisa diwujudkan karena perempuan lebih berpotensi dan pantas berdasarkan sumberdaya yang dimiliki.

Tabel 4: Sex Ratio Provinsi Papua dan Papua Barat, 2013



Rekomendasi:

Untuk meningkatkan partisipasi perempuan Papua dalam pembangunan, dibutuhkan 3 (tiga) topangan yang utuh, konsisten, yaitu: topangan adat, agama, dan Pemerintah. Ketiganya menjadi dasar pembangunan karakter perempuan Papua yang lebih dinamis dan berdaya saing tinggi. Ketiga hal tersebut adalah dasar bagi peradaban di tanah Papua.

- a) **Aspek agama.** Agama menempatkan perempuan hanya sebagai pendamping atau pelengkap laki-laki sehingga diyakini oleh masyarakat Papua cenderung merugikan posisi perempuan. Oleh karenanya bagaimana para pemuka agama untuk mengajarkan dan memberikan pencerahan berpikir kepada perempuan Papua untuk bagaimana melibatkan perempuan untuk menterjemahkan posisi perempuan di dalam agama sehingga tidak terjadi pembunuhan karakter bagi perempuan itu sendiri)
- b) **Aspek Adat.** Adat menempatkan perempuan sebagai objek milik laki-laki (kebanyakan perempuan tidak terlalu banyak muncul) karena tradisi di Papua perempuan dianggap sebagai orang luar karena setelah menikah dia akan keluar lingkungannya dan juga perempuan dianggap sebagai orang luar dari segala bentuk pengambil keputusan adat, perempuan juga dianggap sebagai kepanjangan tangan laki-laki untuk mengerjakan keperluan dan kebutuhan laki-laki.

- c) **Aspek politik.** Secara politik sebenarnya perempuan mempunyai pengaruh dan potensi dan itu terlihat dari pileg beberapa waktu yang lalu, dimana suara perempuan bisa disatukan dan digunakan untuk memilih caleg perempuan dan itu menandakan bahwa perempuan memiliki pengaruh.

IV. Perempuan dan Kepemimpinan di Merauke

Problem Mendasar Perempuan

- Tidak ada ruang/kesempatan yang diberikan oleh laki-laki
- Perempuan sendiri kurang terlibat di dalam berbagai organisasi atau berbagai kegiatan
- Kurangnya informasi, baik dari pemerintah maupun pihak-pihak terkait tentang kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh berbagai pihak, baik di kota maupun di kampung
- Kurangnya pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas perempuan untuk berani tampil dan berbicara di hadapan public.
- Kurangnya kerjasama antar perempuan sehingga menghambat upaya pemberdayaan yang dilakukan.
- Tidak ada ruang di dalam adat yang memberikan kesempatan untuk perempuan bisa berkreasi, berbicara, mengeluarkan pendapat, pikiran.
- Partisipasi perempuan dalam berpolitik, terutama kuota 30% belum diketahui oleh seluruh perempuan.
- Rekrutmen perempuan dalam partai politik, terutama perempuan masuk terlibat sebagai pengurus dalam partai sangat kurang. Perempuan hanya dilibatkan pada saat menjelang pemilu, sebagai salah satu syarat untuk meluluskan verifikasi partai politik dalam setiap Dapil.
- Di birokrasi belum ada perempuan Papua duduk dalam pengambilan kebijakan seperti Kepala Dinas. Mungkin secara kepangkatan belum mencapai syarat yang ditentukan.

Kedudukan Perempuan dalam Budaya dan Adat

Kedudukan perempuan secara budaya dan dalam hukum adat masih ada diskriminasi. Dalam pertemuan-pertemuan adat perempuan tidak dilibatkan. Keputusan entah baik atau tidak baik diambil oleh laki-laki. Perempuan hanya sebagai pelayan untuk menyediakan konsumsi. Contoh, seluruh keputusan untuk menerima investasi/perusahaan hanya diambil oleh laki-laki. Laki-laki tidak mendengarkan keluhan perempuan untuk masa depan anak cucu. Beberapa ilustrasi di bawah ini memaparkan kondisi riil perempuan di Papua terkait investasi dan operasi perusahaan:

- Di Makaling Distrik Okaba, dalam sidang adat seseorang mama mengangkat anak dan menunjukkan kepada tua-tua adat yang sementara bersidang, ***“kamu jual tanah, anak yang ini, besok dia akan tinggal di mana? Kamu bisa bikin anak, lalu anak ini tinggal di mana? Kalau kamu tidak jual tanah, kamu mau bikin anak sampai berapa pun kami siap”*** (2012).
- Di Zanegi Distrik Animha, seorang mama menyesali keputusan pelepasan tanah untuk perusahaan HTI Selaras Inti Semesta yang bernaung di bawah Medco Papua. “Hidup dulu itu masih senang karena

alam ini masih berlimpah. Jadi, hidup itu tidak susah, karena hutan masih antheru. Tidak ada gangguan. Tapi sekarang ini hati nenek sedih...sedih... pikir anak-anak cucu kita ini. Hati nenek ini sedih. Berpikir hidup dulu dengan sekarang tidak sama. Kasihan, nanti anak-anak cucu kita akan hancur, dan tidak bisa hidup senang. Hidup sekarang, nanti anak-anak cucu kita ini mau ke mana?" (Cornelia Balagaize, Film "Mama Malind Su Hilang", 2012)

- Di Kindiki Distrik Ulilin, anak-anak remaja perempuan usia SMU meninggalkan sekolah untuk bekerja di perusahaan (PT Bio Inti Agrindo).
- Di kampung Pahas Distrik Muting, tidak semua perempuan mendapatkan uang hasil penjualan tanah ke perusahaan. Dari sekian miliar (untuk 35 tahun), ada yang mendapatkan hanya 50 ribu atau 5 ribu, bahkan tidak dapat sama sekali.
- Di kampung Poo Distrik Erambu (hak ulayat masuk sampai Distrik Jagebob), pemilik hak ulayat Kwipalo, Baljai, Onjai, Kabaljai dengan luas 200 ha sudah diperjualbelikan oleh marga Baljai ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Sampai saat ini tidak ada pembicaraan sejak awal sampai terjadi transaksi jual beli. Seorang mama (marga Kwipalo) datang ke SKP KAME untuk memfasilitasi menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.
- Di kampung Torai Distrik Erambu, masyarakat lebih mendengarkan saudara paling tua (Ibu Agustina Basik-basik/mantan anggota DPR RI) untuk tidak menjual tanah ke perusahaan tebu Wilmar.

Kedudukan Perempuan dalam Pemerintahan (Desa)

Terdapat sedikit perbedaan antara pemerintahan dan adat. Pemerintahan sekarang sudah mulai terbuka dan sudah mulai mengakomodir perempuan dalam kepemimpinan di kampung dan distrik, masuk dalam kaur-kaur, dan masuk dalam Bamuskam (Badan Permusyawaratan Kampung).

Untuk mendorong perempuan terlibat sebagai aparat kampung, tidak mudah. Karena di kampung kita tidak bisa lihat perempuan dari pendidikannya. Pada umumnya pendidikannya setara. Kalau perempuan di kampung berani, bisa bicara, bisa melawan, bisa memberikan masukan, pikiran, maka bisa diperhitungkan. Jadi tidak bisa dilihat dari pendidikan saja.

Di Kabupaten Merauke, dari 160 kampung, hanya empat kampung yang kepala kampungnya perempuan. Keempat kampung tersebut adalah Kuper dan Sidomulyo di Distrik Semangga, Alatep di distrik Okaba, dan Wenda Asri di distrik Jagebob. Dari keempat kampung ini, hanya dua kampung yang dipimpin perempuan, yakni kampung Kuper (SMU) dan Alatep (SMU).

DPRD Merauke periode 2014-2019 hanya memiliki satu perempuan Papua (sekarang menjadi Ketua DPRD Merauke) dari enam perempuan (salah satunya sekarang menjadi wakil ketua DPRD Merauke) dari 25 anggota DPRD Merauke. Sedangkan periode 2009-2014 satu orang tapi bermasalah di ijazah (ijazah Paket C tapi ijazah palsu, dan akhirnya dipecat dan masuk penjara). Sementara periode 2004-2009 ada satu perempuan Papua. Di DPR RI pernah ada seorang perempuan Merauke yang menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014.

Sekarang ini, ada juga perempuan Papua yang menjabat sebagai Komisioner KPU (bagian Hukum) Kabupaten Merauke periode 2014-2019 dan sekaligus sebagai perwakilan Komnas Perempuan dari Merauke.

Di pemerintahan kabupaten sekarang, ada 3 perempuan jadi pimpinan SKPD: Kepala Dinas PU dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Kepala Dispenda. Hanya Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB yang perempuan asli Papua (S2 Hukum UI).

Kedudukan Perempuan Papua dalam Kehidupan Masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat, peran perempuan sangat terbuka dan banyak yang berpartisipasi dalam menggerakkan kehidupan masyarakat. Perempuan bisa tampil dan berekspresi dengan kemampuan yang dimiliki. Perempuan sangat terlibat aktif dalam berjualan di pasar dan membentuk organisasi Mama-mama Pasar (saat ini didampingi oleh SKP KAME).

UU Otsus Papua No. 21 Tahun 2001 telah memberikan peluang bagi perlindungan dan pemberdayaan perempuan Papua. Hanya, dalam pelaksanaannya kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan Papua belum maksimal dan sinergis. Bahkan, dana OTSUS yang dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan (6%) belum banyak dirasakan secara langsung dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

UU Desa No. 6 Tahun 2014 memberikan peluang bagi peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan di kampung. Dana yang dialokasikan untuk pembangunan kampung sangat terbuka bagi pemberdayaan perempuan. Interaksi dengan masyarakat dan khususnya perempuan Papua selama ini menyiratkan bahwa:

- Peran perempuan Papua sangat bergantung pada pendidikan dan keterampilan
- Peran perempuan Papua bergantung juga pada karakter pribadi perempuan
- Peran perempuan Papua bergantung pada akses yang diberikan kepada perempuan untuk berkreasi dan berekspresi. Akses yang terbuka lebar dan dapat menjadi pintu masuk adalah melalui partisipasi dalam organisasi masyarakat, dan dalam organisasi kemasyarakatan.

Usulan Strategis:

- **Jangka pendek:**

Mendorong kaum laki-laki untuk membuka ruang bagi partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Menghidupkan atau membentuk organisasi perempuan di tingkat kampung sebagai wadah bagi perempuan untuk berpartisipasi.

Mendorong partisipasi perempuan Papua dalam kehidupan berorganisasi. Dalam berorganisasi ini perempuan dapat belajar untuk tampil mengekspresikan diri dan terlibat dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan di kampung.

- **Jangka menengah:**

Membentuk lembaga-lembaga pengkaderan perempuan Papua di tingkat distrik dan kabupaten.

Mempersiapkan kader perempuan untuk terlibat dalam dunia politik dan pengambilan kebijakan public.

- **Jangka panjang:**

Mendorong kebijakan pemerintah di bidang pendidikan untuk menjamin akses pendidikan bagi perempuan Papua mulai dari tingkat PAUD sampai Perguruan Tinggi.

Mendorong kebijakan pemerintah di bidang kesehatan untuk menjamin akses kesehatan bagi perempuan Papua mulai dari tingkat kampung sampai Kabupaten.

Usulan strategisnya antara lain :

- a) Menghidupkan atau membentuk organisasi perempuan di tingkat kampung sebagai wadah bagi perempuan untuk berpartisipasi.
- b) Membentuk lembaga-lembaga pengkaderan perempuan Papua ditingkat distrik dan kabupaten.
- c) Mempersiapkan kader perempuan untuk terlibat dalam dunia politik dan pengambilan kebijakna public.
- d) Mendorong kebijakan pemerintah di bidang pendidikan untuk menjamin akses pendidikan bagi perempuan Papua mulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi.
- e) Mendorong kebijakan pemerintah di bidang kesehatan untuk menjamin akses kesehatan bagi perempuan Papua mulai dari tingkat kampung sampai Kabupaten.

V. Langkah Awal Membangun Gerakan Perempuan

Dalam tema ini, TuK mengundang Ibu Laili^v untuk berbagi pengalaman dalam membangun gerakan perempuan melalui organisasi HAPSARI. HAPSARI memilih untuk membangun organisasi perempuan desa dan independen di luar PKK yang telah mengakar di desa, ini bukanlah pekerjaan mudah pada saat HAPSARI didirikan di tahun 80-an, karena masih sangat kuatnya budaya patriarki, kontrol pemerintahan desa terhadap aktifitas sosial politik bagi warganya (apalagi kaum perempuan), dan pengaruh stigma politik yang negatif tentang gerakan perempuan masa lalu (Gerwani).

Faktor-faktor ini melahirkan mayoritas kaum perempuan pedesaan yang rendah pendidikan formal dan pengetahuannya, sangat tergantung dengan kekuasaan para suami, terbatas akses sosialnya, takut berbicara dan bersuara, mudah dipengaruhi, cenderung tidak percaya diri melakukan aktifitas organisasi tanpa izin aparat pemerintahan desa dan sangat trauma mendengar sebutan Gerwani.

Mayoritas kaum perempuan yang demikianlah yang ada dalam serikat-serikat perempuan anggota HAPSARI. Pada masa awal kegiatan diskusi di desa-desa, seringkali hanya disebut "seperti Gerwani", puluhan perempuan membubarkan pertemuannya. Meski pada akhirnya Orde Baru berhasil

ditumbangkan dan kekuasaan presiden Soeharto berakhir, ini tidak secara otomatis mengakhiri berbagai bentuk kerusakan-kerusakan dimasyarakat yang telah terjadi sepanjang lebih dari 30 tahun. Budaya bisu, ketakutan berorganisasi, ketakutan bersuara, kontrol para suami dan aparat pemerintahan desa terhadap aktifitas perempuan di wilayah publik tetap kuat. Stigma tentang Gerwani tetap menakutkan, stigma bahwa politik itu kotor dan perempuan tidak perlu ikut berpolitik, tetap menghantui dan tetap ampuh untuk melumpuhkan keberanian kaum perempuan memperjuangkan keadilan melalui organisasinya. Dalam kondisi seperti itulah berbagai proses pembangunan organisasi dilakukan HAPSARI, hingga beberapa serikat perempuan tingkat kabupaten di Sumatera Utara berhasil ditumbuhkan.

Papua dengan berbagai problematika yang disana ada hal-hal spesifik, yang membedakannya dengan wilayah-wilayah lainnya karena disana ada kolonialisme, konflik antar kelompok dan ada gereja papua dengan gereja KBH saja yang berbeda-beda maka untuk strateginya adalah menggunakan teater untuk mendekati perempuan karena saat ini sedang berbicara tentang budaya sperma, partisipasi perempuan, afirmatif action sehingga ini merupakan dinamika gerakan perempuan dalam konteks isu HIV-Aids, partisipasi, kerusakan lingkungan dan sebagainya.

Perempuan tidak mendapatkan perlindungan dari negara saat bicara gerakan partisipasi atau pemberdayaan perempuan, sehingga sebaiknya membangun hubungan dengan negara, ini hanya bisa dilakukan oleh perempuan di Papua itu sendiri kepada negara. Ketika datang ke Papua sebaiknya memposisikan diri sebagai pihak lain yang mendukung gerakan perempuan di Papua tersebut, sehingga data dan jaringan yang dimiliki itu akan berguna. Membangun gerakan perempuan harus terstruktur dan sistematis dan sebagai suatu **tindakan bersama**; artinya secara sadar dan terorganisir membebaskan diri dari berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan yang berakar dari adanya perendahan martabat kemanusiaan kaum perempuan.

VI. Penutup

Dalam berbagai wacana maupun praksis, ternyata pengertian partisipasi telah dikerdilkan menjadi mobilitas. Partisipasi yang pengertiannya dipersempit tersebut memang paling gampang dirancang; oleh karenanya paling potensial dipalsukan; dan saat pun ini tugas “menghidupkan” partisipasi telah dialihkan dari Pemerintah kepada pihak lain. Di sisi yang lain, perlu dihayati bahwa gerakan perempuan adalah gerak bersama, membangun solidaritas. Bukan saatnya lagi berteriak “LAWAN X, Y, Z dst” atau saling menjatuhkan antar sesama penggiat perempuan. Gerakan ini mesti fleksibel seperti karet; ada hal fundamental seperti cara pandang yang perlu ditangani serius, ada yang bersifat praksis, contohnya liturgi. Segenap pihak yang berkecimpung di dunia pemberdayaan perempuan perlu belajar teologis feminis sehingga mampu menemukan esensi gerakan memberdayakan perempuan. Untuk ini, kita perlu menemukan apa (alat, hal) yang bisa digunakan untuk melawan: dalam konteks Papua; oleh orang

Papua. Hendaknya kita berbesar hati untuk berperan sebagai *facilitator of change*. Bagaimana posisi Papua? Mesti ambil langkah tegas selaras dengan konteksnya. Mulai bergerak, mungkin dalam skala yang kecil dan komunal, yang terpenting adalah melangkah maju. Karakter yang perlu ada adalah setia kepada proses: kesadaran bahwa membangun gerakan perempuan dan kesetaraan adalah kerja jangka panjang. Dalam proses ini, perlu ada upaya untuk **menangkap** orang yang tepat: siapa *game changer* di level komunitas hingga ke atas. Ini memerlukan upaya pemetaan aktor dan pemahaman konteks yang tepat.

ⁱArtikel ini disiapkan oleh Vera Falinda dan Rahmawati Retno Winarni. Vera adalah staff TuK INDONESIA yang khusus menangani hubungan dengan *stakeholder*, sedangkan Rahmawati saat ini menjabat Direktur Program.

ⁱⁱIbu Maria Ruwiasuti adalah anggota Dewan Pakar Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA). Sejak tahun 1991 Ibu Maria bekerja sebagai *land tenure specialist* dan kritikus politik hukum agraria. Sebelumnya bekerja di bagian non litigasi lembaga bantuan hukum (LBH) Jakarta (1983-1985). Dikirim ke Papua oleh yayasan LBH Indonesia sebagai pioner dan direktur pertama LBH Jayapura 1985. Bekerja dan menetap di Papua sampai Oktober 1990. Kembali bekerja di Asmat (Papua Selatan) tahun 2009-2011 untuk membantu menguatkan kapasitas sekretariat keadilan dan perdamaian (SKP) keuskupan Agats-Asmat. Di samping tugas utamanya di bidang hukum dan pembelaan terhadap masyarakat pribumi Papua, melakukan pelayanan sosial dan mengamati ketidakadilan gender yang dialami kaum perempuan Papua di wilayah-wilayah pedalaman yang telah dikunjungi. Ibu Maria juga Pelatih di Sekolah Perempuan, Wanita Katolik Republik Indonesia (2014, 2012, 2010, 2007), dan Konsorium Pembaruan Agraria, Jakarta (2014).

ⁱⁱⁱBapak Edward Kocu yang menjabat sebagai Ketua Program Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Cenderawasih, Papua. Bapak Kocu telah menghasilkan berbagai karya ilmiah dan penelitian mengenai pengembangan diri, konflik politik dan resolusi konflik, demokrasi dan reformasi di Papua.

^{iv}Narasumber tema ini adalah Pastor Anselmus Amo sebagai Direktur SKP-KAME. Beliau juga menjabat sebagai Pastor dan mendapat penugasan di wilayah Merauke – dan berasal dari ordo *Missionarii Sacratissimi Cordis (MSC)*; di Indonesia lebih dikenal sebagai Kongrerasi Misionaris Hati Kudus.

^vNarasumber tema ini adalah ibu Laili Zailani dari Yayasan Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI). Ibu Laili adalah pendiri HAPSARI dan telah mengorganisasikan perempuan selama 25 tahun, khususnya di Yogyakarta dan Sumatera Utara dan telah melewati berbagai rezim.